

Dilema Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

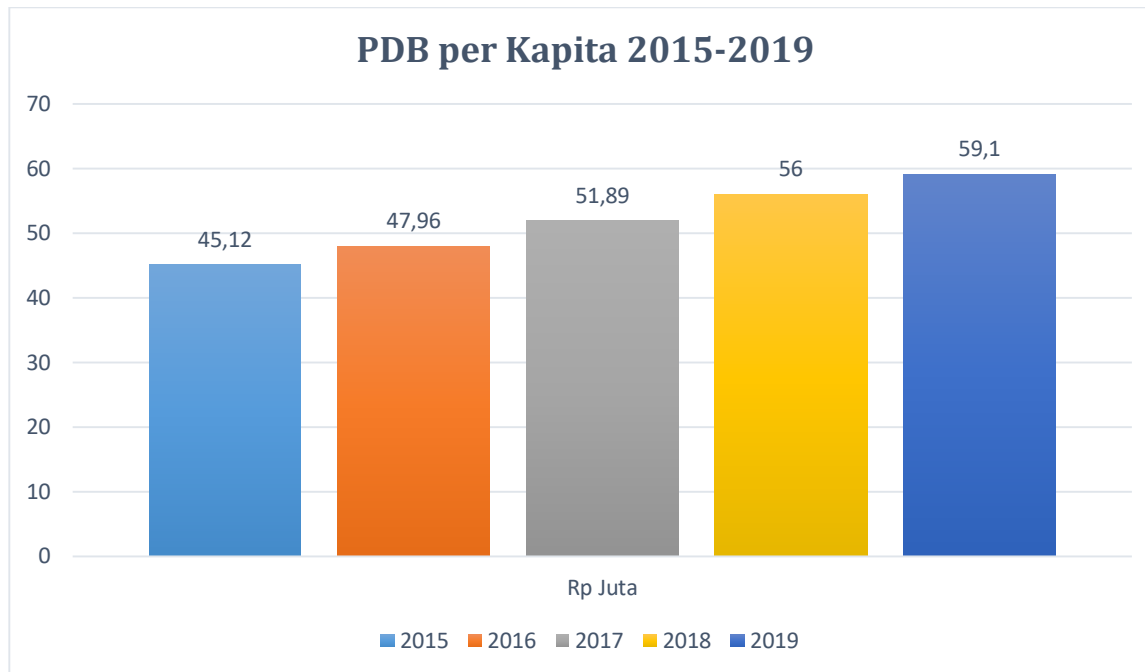
“Dilema ekonomi Indonesia muncul karena dua hal besar yang berbeda terjadi yaitu, disaat Bank Dunia mengumumkan kenaikan status Indonesia menjadi Negara dengan tingkat pendapatan menengah ke atas, potret kemiskinan Indonesia di masa pandemi Covid -19 justru meningkat apalagi muncul klaster “miskin baru” yang merebak di tengah masyarakat, apakah kenaikan status ini layak di sandang oleh Negara Indonesia ?”

Perekonomian merupakan salah satu hal yang paling penting dari sebuah negara, jika kestabilan ekonomi menurun maka banyak pihak yang sangat mungkin terkena dampaknya, salah satu pihak yang paling mungkin terkena dampak paling besar adalah masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Dampak dari ketidakstabilan ekonomi adalah lahirnya kemiskinan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi belakangan ini telah banyak merubah berbagai aspek kehidupan mulai dari cara hidup sampai cara mempertahankan perekonomian. Pemerintah terus menjalankan tugasnya meskipun terkesan lama bertindak sebenarnya pemerintah selalu memikirkan bagaimana cara untuk tetap bertahan di masa pandemi ini dan memikirkan bantuan yang tepat sasaran untuk menyelesaikan problema akibat pandemi di masyarakat.

Kabar Baik di Tengah Pandemi

Disaat yang sama Bank Dunia menyatakan Indonesia ke dalam Negara berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income*) dari sebelumnya berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle income*), yang berarti pendapatan nasional bruto Indonesia naik dikisaran US\$ 4.046 sampai dengan US\$ 12.535 per tahun. Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/ *Gross Income* (GNI) sendiri menghitung seluruh pendapatan warga Negara Indonesia, termasuk yang bekerja diluar negeri namun tidak menghitung pendapatan warga negara asing yang bekerja di Negara Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Databoks.katadata.co.id, 2020

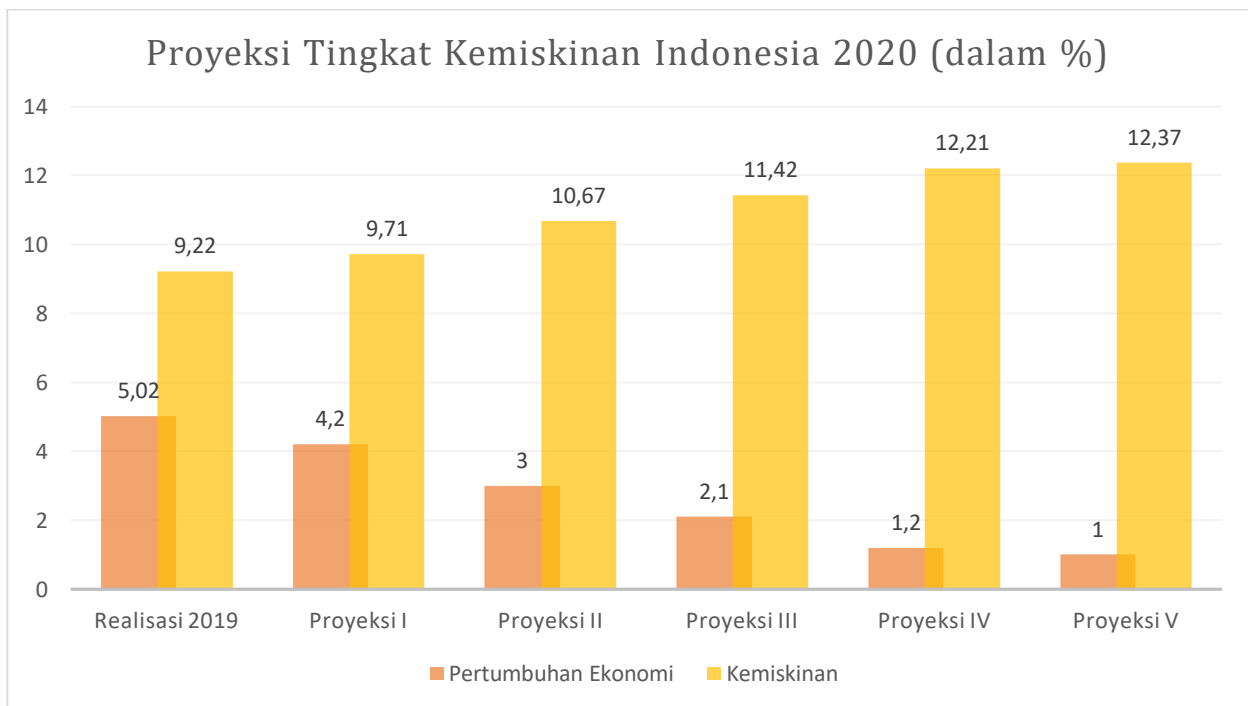
Dalam data yang terlansir dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menyatakan bahwa meskipun perekonomian Indonesia di tahun 2019 mengalami pelambatan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2019 lebih tinggi dari PDB Indonesia pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 59,1 juta.

Hal ini merupakan angin segar dan menjadi kabar yang cukup mengejutkan apalagi Indonesia naik status di masa Pandemi Covid-19. Apalagi, Indonesia menjadi satu-satunya Negara yang dimasa pandemi yang mampu naik status menjadi Negara berpendapatan menengah atas, tentu saja hal ini dapat mendongkrak kepercayaan dan kebanggaan masyarakat serta meningkatkan persepsi investor tentang perekonomian Indonesia. Kabar baik ini juga sangat menunjang keinginan Indonesia menjadi Negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2045. Keinginan Indonesia ini tentunya juga ditunjang dengan penguatan Sumber Daya Alam dalam berbagai aspek, salah satunya adalah aspek pendidikan dan ekonomi.

Potret Angka Kemiskinan Indonesia

Melihat fakta bahwa ekonomi Indonesia telah naik “kasta” tampaknya cukup membanggakan namun disamping itu timbul pertanyaan besar yaitu “Apa benar Indonesia layak naik peringkat sementara angka kemiskinan terus bertambah?”

Indonesia memang patut berbangga hati namun timbul sedikit keraguan akan kepastian Indonesia menyandang predikat mengingat Indonesia menjadi salah satu Negara yang kestabilan ekonominya menurun saat pandemi Covid-19, banyaknya pekerja yang di PHK dan usaha yang berhenti membuat goyah perekonomian yang awalnya berjalan normal, kini harus terseok-seok karena ulah pandemi. Bisa dilihat pada data proyeksi tingkat kemiskinan Indonesia 2020 dari hasil survey Katadata Insight Center (KIC) memperlihatkan bahwa akan terjadi kenaikan angka kemiskinan dan dibarengi dengan penurunan angka pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Katadata Insight Center (KIC) dalam Databoks.katadata.co.id, 2020

Data dari Badan Pusat Statistik pun juga menunjukkan hal yang sama yaitu peningkatan persentase penduduk miskin di Indonesia khususnya pada awal tahun 2020 bulan Maret dengan jumlah penduduk miskin mencapai 26,42 juta orang, dimana saat pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia.

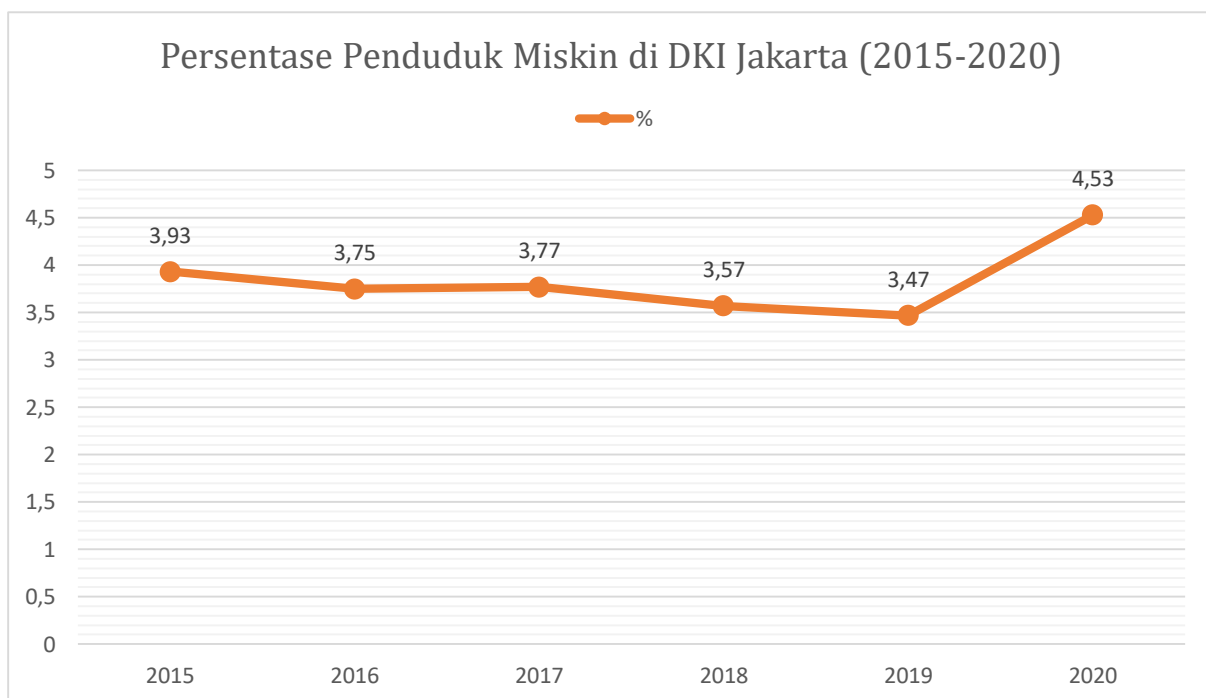


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Databoks.katadata.co.id, 2020

Pada saat yang sama ekonomi Indonesia pun tidak bisa dibilang stabil karena penutupan banyak tempat usaha dan pemberhentian puluhan ribu pekerja sehingga terdapat gejolak kemiskinan baru, sampai-sampai muncul klaster baru yaitu "miskin baru" dimana artinya kemiskinan yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

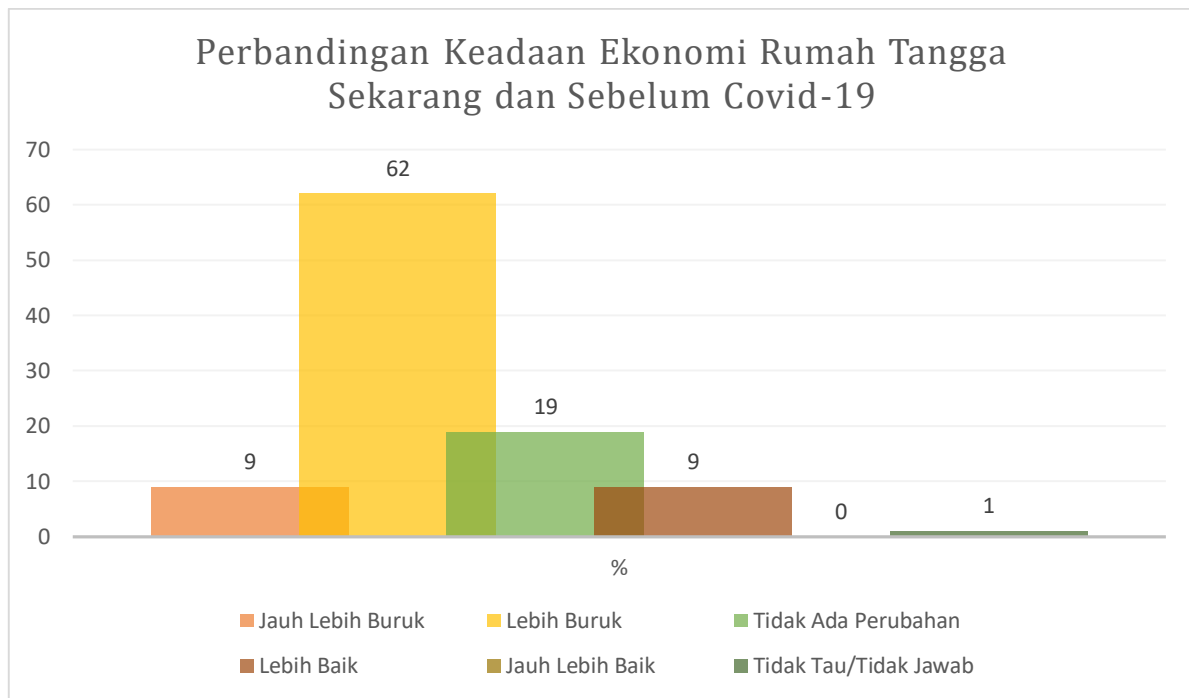
Klaster "miskin baru" cukup berdampak bagi ekonomi Indonesia karena banyak masyarakat yang awalnya mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara mandiri kini harus bergantung pada bantuan dari pemerintah ataupun belas kasihan orang lain. "Miskin Baru" ini juga membawa dampak kepada daya beli masyarakat yang menurun, dan terjadi pula kejadian dimana orang yang kaya menimbun sebanyak-banyaknya bahan pokok, sementara yang miskin malah semakin miskin dan kelaparan.

Dapat dilihat juga data dari Badan Pusat Statistik menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta meningkat di tahun 2020 yang artinya potret kemiskinan tergambar jelas dari data-data ini, dan belum ada yang mengatakan bahwa perekonomian kita berada ditingkat cukup aman jadi kembali lagi ke pertanyaan awal ““Apa benar Indonesia layak naik peringkat sementara angka kemiskinan terus bertambah?” dari fakta dan data yang ada rasanya Indonesia masih harus banyak berbenah untuk kestabilan dan pertumbuhan ekonominya agar kenaikan status ekonomi bisa lebih pantas disematkan pada Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Databoks.katadata.co.id, 2020

Keadaan Ekonomi Masyarakat saat Pandemi Covid-19



Sumber: Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam *Databoks.katadata.co.id*, 2020

Dari data perbandingan keadaan ekonomi rumah tangga sekarang dan sebelum covid-19 menunjukkan fakta bahwa sebanyak 62% keluarga berada dalam keadaan yang lebih buruk, hal ini diakibatkan banyaknya pekerja yang di PHK sehingga tidak ada pemasukan yang pasti lagi untuk keluarga sehingga terjadilah kesulitan ekonomi.

Kesulitan ekonomi ini juga dirasakan oleh para ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dan tidak bisa membuka usaha saat pandemi karena adanya peraturan pemerintah PSBB (Pembatasan Sosial Besrkala Besar) dan hanya berdagang via *online* saja yang memungkinkan namun melihat kesenjangan teknologi di Indonesia banyak sekali hambatan dan keterbatasan ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan di masa pandemi dan krisis ekonomi.

Upaya Pemerintah Mengentaskan “Kemiskinan Baru”

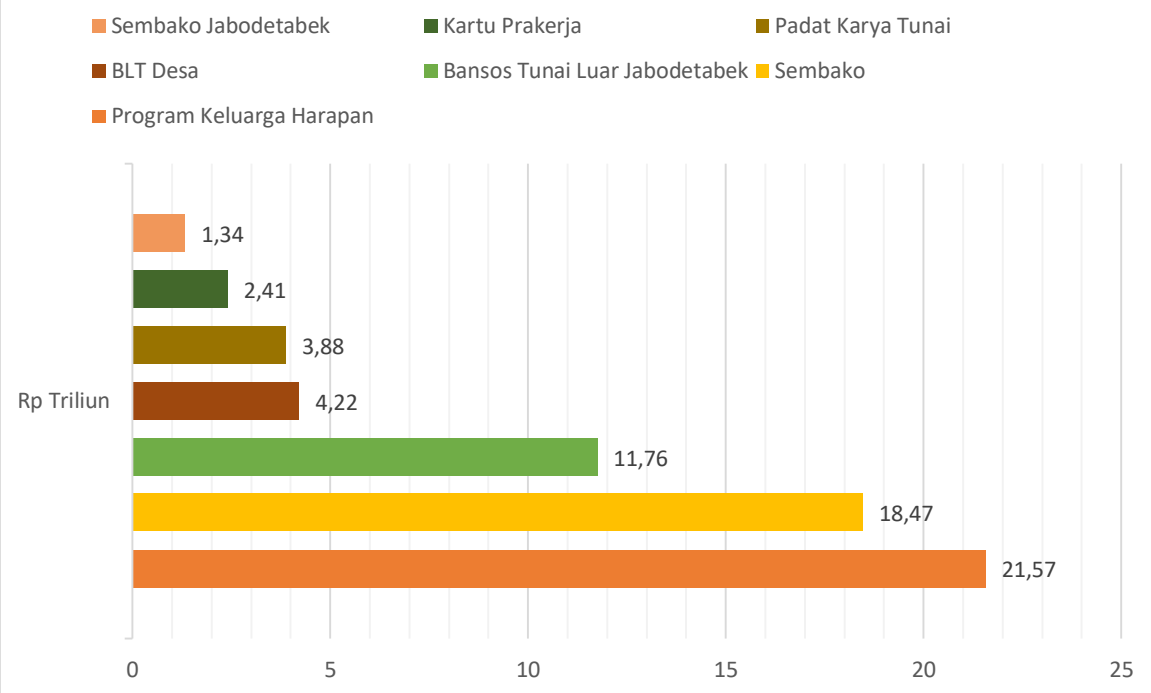
Supaya kenaikan peringkat ekonomi dari Bank Dunia tersebut memang layak disandang oleh Indonesia, maka kenaikan kemiskinan harus segera di hentikan, dan ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk mengintervensi lebih dalam upaya menurunkan angka kemiskinan baru.

Pemerintah memiliki dua tugas besar dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu menyediakan fasilitas kesehatan yang mencukupi dan memadai serta penyelamatan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan tunai dan kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Tak hanya fokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, pemerintah juga terus berupaya menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada berbagai pihak dengan berbagai kelompok umur demi kestabilan ekonomi yang lebih baik

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan banyak bantuan yang dikerahkan pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari hadirnya pandemi Covid-19 yang mematikan perekonomian masyarakat secara luas di banyak daerah di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyediakan dan mendistribusikan tujuh jenis bantuan untuk seluruh masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (untuk keluarga dengan anak yang masih bersekolah), bantuan sembako (untuk masyarakat miskin), Bantuan Sosial Tunai Luar Jabodetabek (untuk masyarakat diluar wilayah Jabodetabek), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa (untuk masyarakat desa), Padat Karya Tunai (untuk pengangguran), Kartu Prakerja (untuk pengangguran dan pekerja terdampak) dan Sembako Jabodetabek (untuk masyarakat wilayah Jabodetabek).

Dengan bantuan-bantuan yang disediakan pemerintah, masyarakat tentunya berharap bantuan tersebut dapat mencukupi kebutuhan harian selama pandemi Covid 19 masih terjadi dan mengurangi angka kemiskinan baru yang melonjak pada masa pandemi dan dapat membuat predikat baru dari Bank Dunia menjadi benar-benar pantas di sandang Indonesia.

Realisasi Bantuan Sosial Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 (per 19 Juni 2020)



Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Databoks.katadata.co.id, 2020